

Policy Brief 2024/01



Bagaimana memperkuat *Gotong-Royong* untuk merehabilitasi saluran irigasi antar petambak budidaya tradisional tanpa insentif moneter?

RANGKUMAN

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah program pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dengan kerjasama pemerintah daerah. Dalam program PITAP, petambak tradisional membentuk Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA) kemudian merehabilitasi saluran irigasi tambak secara swadaya.

Dana insentif dari program PITAP digunakan untuk mensubsidi upah tenaga kerja petambak tradisional dalam merehabilitasi saluran irigasi berdasarkan norma budaya Indonesia untuk bekerja sama yaitu *Gotong-Royong*.

Penelitian ini mengidentifikasi beragam kondisi sosial dan ekologi yang menghambat atau mendorong *Gotong-Royong* di empat desa budidaya dengan menganalisa dampak insentif ekonomi dari program PITAP menggunakan teori *collective action* dan *crowding effect*.

Ringkasan rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada KKP, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BRIDA NTB), dan para petambak tradisional di Desa Lembar, Sekotong, Jerowaru dan Sambelia

TEMUAN PENELITIAN

- Dibutuhkan lebih banyak penelitian terkait proses musyawarah atau deliberasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
- Terdapat beragam faktor sosial dan ekologi yang mempengaruhi hasil program PITAP. Jika perbedaan faktor di setiap konteks dipertimbangkan, maka dampak program PITAP yang lebih positif dapat diharapkan
- Hirarki sosial antar masyarakat pedesaan dapat mempengaruhi hasil musyawarah dan pengambilan keputusan.

REKOMENDASI PENELITIAN

Pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat mengoptimalkan program PITAP dan produksi perikanan budidaya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Mengadakan proses musyawarah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sebagai cara untuk menyesuaikan program PITAP dengan konteks lokal.
- Memfasilitasi forum-forum komunikasi reguler.
- Menyediakan moderator untuk memfasilitasi proses musyawarah.
- Menyediakan program peningkatan kapasitas dan pelatihan berbudidaya yang baik untuk petambak tradisional daripada memberikan insentif moneter.
- Mendukung pembentukan koperasi untuk petambak tradisional sehingga petambak sejahtera dan swadaya.

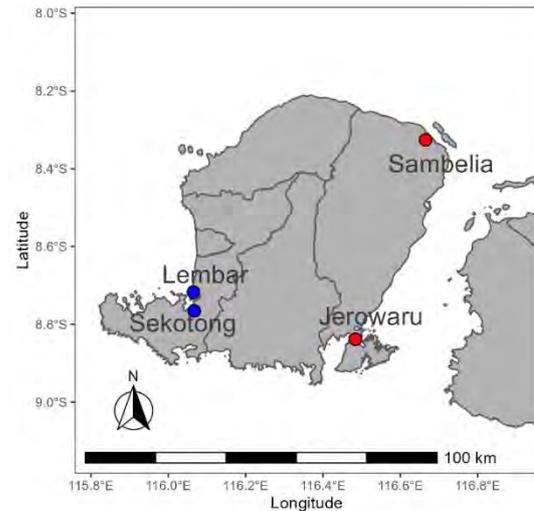
LATAR BELAKANG

Kolam tambak di daerah pesisir merupakan milik pribadi dan seringkali berlokasi di sekitar saluran irigasi yang merupakan milik bersama. Dalam kasus seperti ini, terdapat ketergantungan antar sesama petambak untuk memastikan bahwa saluran-saluran tersebut dipelihara dengan baik dan memitigasi risiko secara bersama-sama (seperti membersihkan lumpur/sampah dan memperbaiki kebocoran saluran). Idealnya, kolam tambak perlu dirawat dan dibersihkan setiap enam bulan sekali untuk menghindari kerusakan struktural yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, siapa yang perlu memperbaiki saluran dan mengapa harus memperbaiki saluran secara bersama sama? Pada situasi demikian, muncul masalah klasik penyediaan barang publik yang ditemukan dalam literatur tata kelola sumber daya milik bersama. Hal ini terjadi ketika terdapat perbedaan risiko yang dihadapi dan insentif yang didapat oleh setiap petambak. Sehingga, kurangnya Gotong-Royong antar petambak dalam mengelola saluran irigasi merupakan sebuah permasalahan tata kelola yang perlu dicermati.

Gotong-Royong merupakan mekanisme tradisional dan institusi informal di Indonesia dalam bekerja sama dan mewujudkan semangat kolektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Program PITAP dirancang dengan nilai Gotong-Royong untuk memotivasi kegiatan kolektif dalam mengelola saluran irigasi dan meningkatkan produksi tambak tradisional.

PITAP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Program ini telah diterapkan sejak tahun 2013 di 18 provinsi di Indonesia dan 77 kabupaten budidaya perikanan (Pedoman Teknis Program PITAP No. 31/2021). Dalam pelaksanaan PITAP, petambak wajib membentuk Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA). POKLINA beranggotakan sekitar 20 petambak tradisional di suatu desa untuk mengelola saluran irigasi secara bersama.

Studi kasus yang mendasari ringkasan kebijakan ini dilakukan di empat desa di Lombok Barat dan Lombok Timur. Di Lombok Barat, program PITAP dilaksanakan di Desa Lembar dan Sekotong pada tahun 2021. Di Lombok Timur, program PITAP dilaksanakan di Desa Jerowaru dan Sambelia pada tahun 2020 (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Pulau Lombok, Indonesia, dengan indikasi lokasi penelitian di empat desa.

Di Lembar, Sekotong, dan Jerowaru, budidaya perikanan berbasis masyarakat dengan mengandalkan sistem tambak tradisional. Sementara itu, Desa Sambelia menggunakan sistem tambak tradisional 'plus'. Sistem budidaya tambak dianggap tradisional jika tambak tidak diberi pakan dan kepadatan ikan kurang dari atau sama dengan 5-10 benih per m². Dalam sistem tambak tradisional, sebelum proses budidaya, kolam dikeringkan terlebih dahulu dan tanah di dalam kolam diberi pupuk menggunakan bahan herbal dan pupuk pertanian untuk menumbuhkan plankton dan/atau alga. Sistem tambak tradisional 'plus' menggunakan pakan pelet, kepadatan kolam sekitar 25-30 benih per m², dan beberapa aerator. Sistem tambak tradisional dan tradisional plus menggunakan konstruksi kolam tanah, bekerja dengan peralatan sederhana seperti cangkul dan sekop, serta mengandalkan air pasang dan surut dari saluran irigasi untuk pertukaran air.

Ringkasan kebijakan ini merupakan bagian dari sebuah disertasi dengan tujuan penelitian untuk memahami peran musyawarah sebagai mekanisme dalam adaptasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Gotong-Royong. Penelitian ini menggunakan beragam metode seperti tinjauan literatur sistematis, studi kasus, dan studi eksperimental. Temuan penelitian berkontribusi pada teori *collective action* dalam cakupan tata kelola budidaya perikanan berbasis masyarakat dan berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk implementasi program PITAP di Indonesia yang berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengadakan proses musyawarah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sebagai cara untuk menyesuaikan program PITAP dengan konteks lokal. Program PITAP harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekologi yang beragam di setiap desa. Proses musyawarah dapat memfasilitasi mekanisme adaptasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pemegang kepentingan untuk mendiskusikan masalah dan memutuskan solusi terbaik. Mengintegrasikan proses musyawarah dalam program pemerintah dapat mendorong tata kelola partisipatif yang efektif.

Memfasilitasi forum-forum komunikasi reguler. Forum komunikasi yang teratur dapat mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk meningkatkan produksi tambak. Pertemuan rutin antar pemegang kepentingan (termasuk anggota masyarakat) tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan memfasilitasi koordinasi, tapi juga mendorong kegiatan Gotong-Royong. Di luar program PITAP, partisipasi petambak dan pemerintah dalam forum komunikasi reguler dapat memberikan peluang untuk berdiskusi terkait permasalahan lainnya sehingga dapat memajukan petambak tradisional.

Menyediakan moderator untuk memfasilitasi proses musyawarah. Tantangan dalam proses musyawarah antar petambak tradisional di Lombok adalah hierarki dalam interaksi sosial. Hierarki sosial dapat berupa kepemilikan modal, pengalaman, usia, pendidikan, dan lainnya, dapat mempengaruhi partisipasi individu dalam berdiskusi. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah daerah perlu menyediakan moderator untuk mendorong individu agar berkontribusi dalam proses musyawarah.

Menyediakan program peningkatan kapasitas dan pelatihan berbudidaya yang baik untuk petambak tradisional daripada memberikan insentif moneter. Peningkatan kapasitas bagi petambak merupakan program pembangunan manusia yang penting untuk didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan peningkatan kapasitas bagi petambak berupa pelatihan kepemimpinan dalam mengkoordinasikan masyarakat dan mengelola konflik. Selain itu pelatihan berupa pengetahuan berbudidaya yang baik dapat meningkatkan kesadaran untuk ber-Gotong-Royong dalam mengelola saluran irigasi secara efisien dan efektif. Kurangnya pemahaman tentang ketergantungan budidaya tambak dengan sistem irigasi telah menyebabkan buruknya sistem irigasi dan produksi tambak yang rendah.

Mendukung pembentukan koperasi untuk petambak tradisional sehingga petambak sejahtera dan swadaya. Koperasi petambak budidaya dapat memfasilitasi kolaborasi, akses pasar, kemajuan teknologi, dan akses modal antar anggota. Koperasi petambak budidaya memainkan peranan penting dalam memfasilitasi Gotong-Royong dan meningkatkan kesejahteraan petani tambak tradisional dan skala kecil di Indonesia. Hal ini tercermin dari keberhasilan koperasi di sektor pertanian. Saat ini koperasi nelayan di Indonesia belum mewadahi petambak perikanan. Sehingga dukungan pemerintah untuk membentuk koperasi petambak budidaya sangat diperlukan. Pembentukan koperasi petani budidaya perikanan memerlukan kerjasama pemerintah yang bersifat multilevel dan lintas tingkat.

REFERENCES

- Paramita, A. O., Partelow, S., & Fujitani, M. (2023). A systematic review of deliberation research in marine and coastal case studies. *Frontiers in Marine Science*, 10. DOI: 10.3389/fmars.2023.1178453
- Paramita, A. O., Partelow, S., Schlüter, A., & Buhari, N. (2023). Can the Indonesian Collective Action Norm of *Gotong-Royong* Be Strengthened with Economic Incentives? Comparing the Implementation of an Aquaculture Irrigation Policy Program. *International Journal of the Commons*, X(X), pp. 1–19. DOI: <https://doi.org/10.5334/ijc.1273>
- Paramita, A. O., Partelow, S., Buhari, N., Fujitani, M. Improving the depth and complexity of stakeholder deliberation using images: experimental evidence from Indonesia. Submitted to the *International Journal of the Commons*.
- Partelow, S., Schlüter, A., O Manlosa, A., Nagel, B., & Octa Paramita, A. (2022). Governing aquaculture commons. *Reviews in Aquaculture*, 14(2), 729-750.

ABOUT THIS POLICY BRIEF

This Policy Brief is part of a series aiming to inform policy-makers on the key results of the ZMT research projects and provide recommendations to policy-makers based on research results. The series of ZMT Policy Briefs can be found at www.leibniz-zmt.de/policy_briefs.html. This publication was commissioned, supervised and produced by ZMT.

ACKNOWLEDGEMENTS

This policy brief was developed based on a collaborative research project COMPASS (Comparing Aquaculture System Sustainability) between the Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT) in Germany, University of Mataram, and IPB University, Indonesia. Financial support for COMPASS was provided by BMBF (Grant/Award Number 031B0785).

IMPRINT

Authors: Adiska Octa Paramita ^{ab}, Stefan Partelow ^c, Achim Schlüter ^{ab}
The authors work at, or are affiliated with, a Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), b Constructor University, Germany, c University of Bonn, Germany

Published by the Leibniz Centre for Tropical Marine Research
Fahrenheitstr. 6, D-28359 Bremen, Germany

Editor: Rebecca Lahl

E-Mail: OKE@leibniz-zmt.de

Phone: +49 421 23800 -163

Homepage: <http://www.leibniz-zmt.de>

DISCLAIMER

This policy brief was commissioned, supervised and produced by the COMPASS researcher team. The policy recommendations made do not necessarily reflect the views of the ZMT or its partners.